

RINGKASAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang berada di dalam lingkungannya. Upaya BPOM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah berhasil dilakukan dengan berdasarkan pada hasil implementasi kebijakan program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri (PEKPPP Mandiri) di BPOM. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri di Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat”. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang dimiliki oleh George C. Edward terkait aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui model interaktif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dipilih informan dari kepala Tim Penilai, penanggungjawab, serta evaluator yang mengurus kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi seluruhnya berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan PEKPPP Mandiri yang dilaksanakan oleh BPOM dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Aspek komunikasi berpengaruh terhadap berlangsungnya penyampaian informasi kebijakan secara jelas, terarah, dan konsisten. (2) Aspek sumber daya yang memadai baik dari segi pemahaman sumber daya manusia yang kompeten maupun sumber daya anggaran dan fasilitas yang memadai juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan. (3) Aspek disposisi berupa komitmen yang tinggi dari pimpinan. (4) Aspek struktur birokrasi berupa adanya pembagian kewenangan yang jelas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program PEKPPP Mandiri di BPOM. Namun demikian, pada aspek komunikasi disarankan agar mekanisme PEKPPP yang dibuat oleh Kementerian PAN-RB dan diikuti oleh BPOM hendaknya dapat digunakan dalam beberapa tahun dan aturan hukum yang berkenaan dengan kebijakan tersebut dapat diperbaharui mengikuti perubahan kondisi yang ada. Selain itu, untuk aspek sumber daya disarankan agar BPOM dapat membuat sertifikasi bagi seluruh SDM yang telah melaksanakan Bimbingan Teknis. Terkait aspek disposisi dan struktur birokrasi maka dapat dipertahankan yakni dengan cara memastikan agar komitmen pimpinan dan pembagian kewenangan pada kelompok pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, PEKPPP.

SUMMARY

The Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) seeks to improve quality public services in all Public Service Provider Units (UPP) within its scope. BPOM's efforts to improve the quality of public services have been successful based on the results of the implementation of the Independent Public Service Provider Performance Monitoring and Evaluation (PEKPPP Mandiri) program policy at BPOM. Referring to this, this research was conducted to examine the "Implementation of the Independent Public Service Provider Performance Monitoring and Evaluation Program Policy at the Central Food and Drug Supervisory Agency". This research uses the framework of George C. Edward related to aspects that affect the success of policy implementation, namely aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Data collection methods in this study used interviews, observations, and documentation with data analysis carried out descriptively qualitative through an interactive model. The technique of determining informants using purposive sampling technique and selected informants from the head of the Assessment Team, the person in charge, and the evaluator who took care of the policy. The results showed that the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure all affect the success of the PEKPPP Mandiri policy implemented by BPOM with the following explanation: (1) The communication aspect affects the delivery of policy information in a clear, directed, and consistent manner. (2) The aspect of adequate resources both in terms of understanding competent human resources as well as budget resources and adequate facilities also influences the successful implementation of policies carried out. (3) Aspects of disposition in the form of high commitment from the leadership. (4) Aspects of bureaucratic structure in the form of a clear division of authority.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have an influence on the successful implementation of the PEKPPP Mandiri program policy at BPOM. However, in the communication aspect, it is suggested that the PEKPPP mechanism created by the Ministry of PAN-RB and followed by BPOM should be used for several years and the legal rules relating to the policy can be updated following changes in existing conditions. In addition, for the resource aspect, it is suggested that BPOM can make certification for all human resources who have carried out Technical Guidance. Regarding the aspects of disposition and bureaucratic structure, it can be maintained by ensuring that the commitment of the leadership and the division of authority in the policy implementation group can run well.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, PEKPPP.